

BAB II

PROFIL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROVINSI BENGKULU

A. Sejarah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengintegrasikan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Lembaga ini bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tata kelola administrasi pada kedua bidang tersebut.¹ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu. Lembaga ini bertugas membantu gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan serta kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi.

Sejarah kelembagaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu merupakan hasil integrasi dari dua jalur perkembangan yang awalnya terpisah, yaitu bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Pembentukan bidang kearsipan bermula dari kebutuhan mendesak pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan pada awal tahun 1990-an.

¹Peraturan Gubernur Bengkulu No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Pasal 2 -24, Hlm. 3-24

Hal ini direspons oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Nomor 061/1/3450/SJ tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah di seluruh provinsi. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Gubernur Bengkulu mengajukan usulan konkret pada tanggal 2 Juli 1991.² Urgensi usulan ini didasari oleh kondisi faktual di lapangan, di mana volume arsip bernilai guna tinggi setiap tahunnya mencapai 11.171 kotak, 14.765 kartu indeks, dan 78 buku daftar arsip. Selain itu, terdapat rata-rata 25 karung berkas dan 2.500 daftar arsip yang menumpuk di gudang yang tidak memadai, sehingga rawan rusak atau hilang. Kementerian Dalam Negeri kemudian menyampaikan perincian operasional pada tanggal 14 Mei 1992 melalui Surat Keputusan Nomor 061/1/345/SJ kepada Gubernur Bengkulu saat itu, Drs. H.A. Razie Jachya.

Langkah penataan ini mendapat dukungan penuh dari tingkat pusat melalui surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Arnas), Dr. Noerhadi Magetsari, pada tanggal 12 Agustus 1991.³ Dukungan resmi tersebut menjadi landasan bagi disahkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Tingkat I Bengkulu.⁴ Dokumen hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Rudini,

²Surat Usulan Gubernur Bengkulu, No. 061/1/3450/SJ, 2 Juli 1991, dalam berkas *Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1993*.

³Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Surat Dukungan Kepala ANRI kepada Gubernur Bengkulu, 12 Agustus 1991, dalam berkas *Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1993*.

⁴Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 1992 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Tingkat I Bengkulu, 4 Mei 1992, dalam berkas *Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1993*.

pada tanggal 4 Mei 1992 ini mempertegas komitmen pusat terhadap perbaikan tata kelola dokumen di daerah. Pemerintah daerah kemudian meresponsnya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 10 Tahun 1992.⁵

Sebagai realisasi dari regulasi tersebut, pada tahun 1993, Drs. Ahmad Solihin ditunjuk sebagai Kepala Bagian Arsip Daerah pada Kantor Biro Tata Usaha. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam menjalankan fungsi pelayanan administratif. Dari aspek kepegawaian, aparatur sipil negara yang ditempatkan pada unit kerja awal ini memiliki jenjang karier tertinggi hingga golongan III/a.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedua fungsi lembaga perpustakaan dan kearsipan ini mengalami penyatuan struktur. Penyatuan fungsi kearsipan secara resmi terjadi pada tahun 2009 melalui pembentukan Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu. Akhirnya, pada tahun 2016, lembaga ini resmi berubah status menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2016. Sepanjang sejarahnya, lembaga ini telah mengalami enam kali pergantian nama, sebuah cerminan dari

⁵Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 10 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu, ditetapkan pada 14 November 1992 di Bengkulu, dalam berkas *Pembentukan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Tahun 1993*.

evolusi kelembagaan yang panjang dan kompleks.⁶

Penyatuan kedua fungsi tersebut dalam satu tata kelola keorganisasian didorong oleh kebijakan penataan ulang birokrasi dan penyelarasan manajemen informasi secara nasional. Terdapat tiga alasan utama yang melandasi penggabungan ini. Pertama, efisiensi anggaran dan organisasi melalui perampingan struktur OPD yang memiliki kesamaan tugas, sehingga penggunaan sumber daya manusia dapat berjalan lebih optimal.

Kedua, penyatuan fungsi informasi karena bidang perpustakaan dan kearsipan sama-sama bertujuan untuk mengelola, melestarikan, dan menyebarkan data sebagai bukti sejarah maupun sumber pengetahuan. Penggabungan ini sekaligus memudahkan pengembangan sistem layanan berbasis teknologi informasi secara terpadu. Ketiga, penguatan identitas kelembagaan sebagai pusat penyelamat memori kolektif daerah yang diharapkan mampu meningkatkan literasi serta kesadaran masyarakat terhadap warisan dokumen sejarah di Provinsi Bengkulu.⁷ Kantor DPK Provinsi Bengkulu saat ini berlokasi di Jalan Mahoni Nomor 12, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.⁸

⁶Website DPK Provinsi Bengkulu, Profil, <https://www.perpustakaankearsipanprovinsibengkulu.com/profil/>, diakses 20 September 2025 pukul 20:10 WIB

⁷Observasi Awal, yng dilakukan di Sub Bagian Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, pada 27 Agustus 2025

⁸Website DPK Provinsi Bengkulu, Profil, <https://www.perpustakaankearsipanprovinsibengkulu.com/profil/>, diakses 20 September 2025 pukul 20:10 WIB

B. Visi, Misi, Fungsi, dan Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu

Sebagai instansi yang memegang peranan vital dalam pelestarian literasi dan memori kolektif daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu beroperasi dengan landasan strategis yang kuat. Keberadaan lembaga ini diarahkan oleh cita-cita besar dan tanggung jawab teknis yang tertuang dalam Visi, Misi, Fungsi dan Tujuan di poin-poin berikut:

1. Visi Lembaga

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu, yang menjadi panduan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, adalah “Bengkulu Gemar Membaca dan Tertib Arsip”⁹

2. Misi Lembaga

Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu dirumuskan secara paralel untuk mencapai visi tersebut adalah “Mewujudkan masyarakat provinsi Bengkulu yang gemar membaca dan Mewujudkan pemerintahan provinsi Bengkulu yang tertib arsip.”¹⁰

⁹Peraturan Gubernur Bengkulu No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Pasal 2 -24, Hlm. 3-24

¹⁰Peraturan Gubernur Bengkulu No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Pasal 2 -24, Hlm. 3-24

3. Fungsi Lembaga

Untuk melaksanakan tugas pokok yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu memiliki sepuluh fungsi utama yang mencakup aspek manajerial, teknis perpustakaan, dan teknis kearsipan. Khusus pada fungsi teknis kearsipan meliputi pemberian dukungan teknis dan pembinaan di bidang kearsipan kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian kearsipan vital dan kearsipan terjaga.

4. Tujuan Lembaga Dibentuk

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan fungsi inti lembaga. Tujuan ini dijabarkan secara khususnya pada bidang kearsipan yaitu meningkatnya pengembangan dan sistem administrasi kearsipan berfokus pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui sistem kearsipan yang profesional. Pencapaiannya meliputi pemberian dukungan teknis kearsipan (pembinaan dan pengawasan) kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta pelaksanaan penyelamatan dan pelestarian kearsipan vital dan kearsipan terjaga sebagai aset nasional di daerah.¹¹

¹¹Peraturan Gubernur Bengkulu No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Pasal 2 -24, Hlm. 3-24

C. Data Arsip SK Gubernur 1982-2015 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian, data yang digunakan adalah arsip Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu mengenai kebijakan administrasi dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Data arsip periode 1982–2015 ini merupakan sumber primer penting untuk memahami perkembangan tata kelola pemerintahan daerah. Dokumen-dokumen ini dikategorikan sebagai arsip statis karena telah melewati masa retensi administrasi dan kini berfungsi sebagai data historis permanen. Data tersebut menyediakan sumber utama untuk memahami perkembangan tata kelola pemerintahan daerah, berupa transformasi pemerintahan dari masa orde baru, reformasi, hingga era otonomi daerah. Keberadaannya memberikan bukti otentik mengenai proses pengambilan keputusan, pola kepemimpinan, dan dinamika kelembagaan secara akurat berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang.¹²

1. Bidang Kepegawaian

Bidang Kepegawaian merupakan basis legal sekaligus rekaman historis yang khusus mencatat pergerakan karier, status, dan penugasan resmi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sebagai cerminan dari vitalnya administrasi sumber daya manusia dalam birokrasi, dokumen dalam bidang ini merekam implementasi manajemen

¹² Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

aparatur dari tahun 1982 hingga 2015 secara runtut. Seluruh arsip yang tercipta mendokumentasikan setiap tahapan karier pegawai, mulai dari pengangkatan awal, mutasi antar-wilayah, hingga pemberhentian atau pensiun. Melalui rangkaian dokumen tersebut, terlihat jelas adanya kepatuhan birokrasi lokal terhadap regulasi administrasi nasional, yang secara langsung memengaruhi stabilitas struktur pemerintahan dan efektivitas tata kelola daerah di Bengkulu.¹³

a. Karier (Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun)

Siklus hidup karier seorang PNS terekam secara sistematis melalui berbagai kebijakan pengangkatan, pemindahan, hingga pensiun yang memperlihatkan pola kontrol birokrasi yang terstruktur. Hubungan kerja ini terlihat jelas pada dekade 1980-an, seperti pada Surat Keputusan (SK) pemindahan Rusli Khair (1982) dan M. Thaib Nazir (1984), di mana mutasi pegawai aktif digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen penyegaran sekaligus pengawasan wilayah yang jauh dari pusat provinsi.¹⁴

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan fisik di Bengkulu, pola administrasi ini berkembang pada proses perluasan struktur pemerintahan yang lebih

¹³ Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

¹⁴ Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

kompleks. Siklus karier ini kemudian ditutup secara tertib pada dokumen pensiun tahun 1994, yang membuktikan konsistensi birokrasi Bengkulu dalam menjalankan regenerasi aparatur sesuai koridor hukum yang berlaku.

b. Penunjukan Pejabat

Selain siklus karier rutin, keberlanjutan tata kelola birokrasi juga sangat bergantung pada mekanisme pengisian jabatan strategis yang diatur melalui penunjukan langsung oleh kepala daerah. Salah satu bukti awalnya terdokumentasi dalam SK penunjukan Kepala Badan Pengelola (BP) 7 Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1982, yang diterbitkan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan di tingkat kabupaten.

Langkah taktis penunjukan pejabat ini terus berlanjut hingga tahun 2015 melalui rangkaian keputusan penting mengenai pengangkatan Pejabat (Pj) Bupati untuk wilayah Muko-Muko, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan Seluma. Rangkaian keputusan ini menjadi bukti autentik mengenai peran aktif Gubernur dalam menjaga stabilitas politik lokal dan mengantisipasi kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan kondusif di tengah masa transisi pemilihan kepala daerah.¹⁵

¹⁵Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

2. Bidang Sumber Daya Manusia

Berbeda dengan Bidang Kepegawaian yang berfokus pada individu aparatur, Bidang Sumber Daya Manusia lebih mengkaji pembentukan kerangka kerja organisasi serta pengelolaan kelompok tugas khusus demi merespons dinamika kebutuhan daerah. Bidang ini mendokumentasikan alokasi tenaga kerja dan pengaturan tata kelola internal dalam rangka pencapaian target kebijakan tertentu. Melalui penataan arsip di bidang ini, terlihat jelas evolusi peran pemerintah daerah yang tumbuh semakin kompleks seiring bergesernya prioritas pembangunan, yang secara garis besar terbagi ke dalam tata kelola internal instansi dan pembentukan tim kerja sektoral.

a. Tata Kelola Internal

Tata kelola internal pemerintah daerah membutuhkan standarisasi prosedur yang kuat agar operasional organisasi dapat berjalan secara akuntabel. Fase awal penertiban sistem ini terekam dalam Surat Keputusan tentang Tata Administrasi Bendahara Daerah (1986), yang menjadi bukti autentik adanya upaya serius Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meminimalisir penyimpangan administrasi keuangan sejak dekade 1980-an.

Sistem tata kelola yang mulanya berfokus pada penertiban keuangan ini kemudian berkembang secara struktural pasca-Reformasi, yang ditandai dengan pembentukan Dinas Kesejahteraan Sosial pada tahun 2001. Perubahan struktur organisasi tersebut membuktikan bahwa birokrasi Bengkulu mampu beradaptasi secara dinamis terhadap semangat otonomi

daerah, dengan menggeser fokus kerja dari urusan pemerintahan umum menuju pelayanan sosial kemasyarakatan yang lebih luas.¹⁶

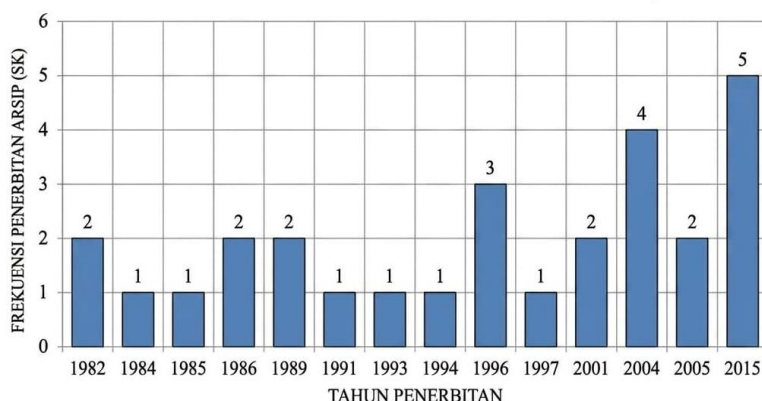
b. Pembentukan Tim

Sejalan dengan penataan organisasi secara struktural, pemerintah daerah juga kerap membentuk tim kerja non-struktural yang bersifat sementara untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus yang berada di luar fungsi rutin instansi. Pada kurun waktu 1988 hingga 1997, arah kebijakan pembentukan tim ini sangat dipengaruhi oleh agenda nasional, seperti pembentukan Panitia Penataran P-4, Badan Pengelola Simulasi P-4, dan Tim Monitoring P-4 yang berfungsi sebagai instrumen birokrasi dalam menjaga stabilitas nilai politik negara pada masa Orde Baru.

Pergeseran substansi tim kerja baru terlihat memasuki tahun 2004 dan 2005, di mana arah pembentukan tim mulai berorientasi pada manajemen risiko wilayah dan profesionalisme administrasi. Hal ini ditunjukkan melalui pembentukan Tim Penyusun Rencana Pengembangan Pulau Enggano (2004) sebagai langkah mitigasi bencana di wilayah terluar, yang kemudian diikuti dengan pembentukan Tim Akuisisi Arsip serta Tim Jadwal Retensi Arsip (JRA) pada tahun 2005. Langkah terakhir ini menjadi tonggak sejarah baru yang membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menerapkan prinsip

¹⁶Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

pemerintahan modern yang transparan dengan mengutamakan pengamanan aset informasi dan penyelamatan memori kolektif daerah.¹⁷



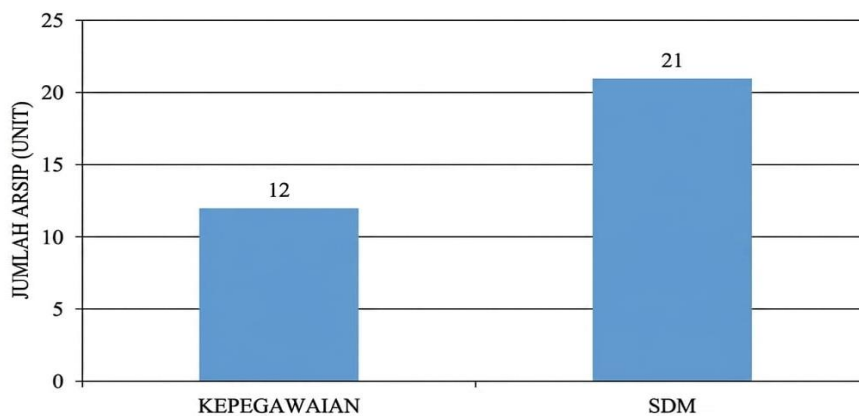
Gambar 1: Frekuensi Penerbitan Dokumen Arsip Surat Keputusan Gubernur Bengkulu per Tahun (1982-2015)

Sumber: Data Penulis

Diagram 1 menyajikan data frekuensi penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bengkulu periode 1982–2015 dengan total 33 unit arsip. Pada rentang 1982–1997, intensitas penerbitan relatif rendah dengan rata-rata 1 hingga 2 unit per tahun. Frekuensi terendah tercatat sebanyak 1 unit pada tahun 1984, 1985, 1991, 1993, 1994, dan 1997. Sebaliknya, peningkatan jumlah arsip mulai terlihat pada awal 2000-an, dengan puncak penerbitan terjadi pada tahun 2015 sebanyak 5 unit dan tahun 2004 sebanyak 4 unit. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan aktivitas administrasi

¹⁷Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.

pemerintah daerah dalam merespons dinamika transisi kepemimpinan serta upaya penyelamatan memori kolektif daerah¹⁸

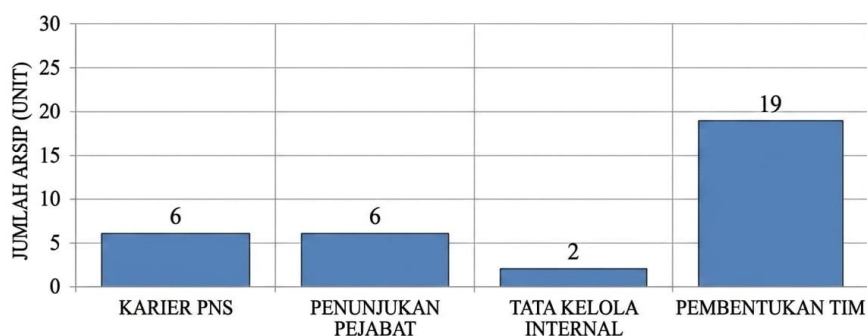


Gambar 2: Jumlah Arsip Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Berdasarkan Bidang

Sumber: Data Penulis

Diagram 2 menunjukkan bahwa arsip SK Gubernur diklasifikasikan ke dalam dua bidang utama, yaitu Bidang Kepegawaian dan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Bidang SDM memiliki proporsi lebih besar dengan 21 unit arsip, sementara Bidang Kepegawaian mencatat 12 unit arsip. Bidang Kepegawaian berfokus pada manajemen individu, meliputi pengangkatan, mutasi, dan pensiun pegawai. Di sisi lain, Bidang SDM lebih menitikberatkan pada pengembangan organisasi, seperti pembentukan tim kerja khusus. Data ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah daerah lebih dominan diarahkan pada penataan kerangka kerja organisasi dibandingkan urusan administrasi kepegawaian.

¹⁸Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.



Gambar 3: Jumlah Arsip Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Berdasarkan Sub Bidang

Sumber: Data Penulis

Diagram 3 menunjukkan Distribusi arsip berdasarkan sub-bidang, data yang diperoleh menunjukkan variasi fokus kebijakan pemerintah daerah. Sub-bidang Pembentukan Tim mencatat jumlah tertinggi dengan 19 unit arsip, yang mencakup tim kerja era Orde Baru hingga tim teknis modern. Sub-bidang Karier PNS dan sub-bidang Penunjukan Pejabat masing-masing memiliki 6 unit arsip. Arsip karier PNS merekam jejak pegawai, sedangkan arsip penunjukan pejabat didominasi oleh pengisian jabatan saat transisi kepemimpinan. Terakhir, sub-bidang Tata Kelola Internal memiliki jumlah paling sedikit, yaitu 2 unit arsip, yang berfokus pada standarisasi administrasi keuangan dan penataan struktur organisasi dinas. Keragaman sub-bidang ini merepresentasikan peran pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan kebutuhan tata kelola yang semakin kompleks.¹⁹

¹⁹Observasi Lapangan, Gedung depo arsip statis Surat Keputusan Gubernur Bengkulu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, 12 Desember 2025.